

## EVALUASI PROGRAM PENDAMPING DESA DI KABUPATEN BENGKALIS

Nina Yuslaini<sup>1</sup>, Septa Juliana<sup>2</sup>

*Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru 28284, Riau, Indonesia*

*Email: ninayuslaini@soc.uir.ac.id. septajuliana@soc.uir.ac.id*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Program Pendamping Desa di Kabupaten Bengkalis dan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian survey, tingkat eksplanasinya deskriptif serta menggunakan analisis data kualitatif. Peneliti mewawancarai secara langsung dan secara mendalam kepada *key informant* yang dianggap paling mengetahui Program Pendamping Desa dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis serta diharapkan menjadi acuan dalam membuat pedoman kebijakan terkait dengan Pendamping Desa di Kabupaten Bengkalis kedepannya.

**Kata Kunci:** Program, Pendamping Desa

This study aims to look at the Village Companion Program in Bengkalis Regency and this research was conducted using survey research methods, the level of exploration was descriptive and used qualitative data analysis. The researcher interviewed directly and in depth with the key informants who were considered to be most knowledgeable about the Village Companion Program by using purposive sampling technique. Practically, the results of this study are useful as information material for the Bengkalis Regency Government especially the Bengkalis District Community Empowerment Office and are expected to be a reference in making policy guidelines related to Village Facilitators in Bengkalis Regency in the future.

**Keywords:** Program, Village Companion

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Undang-Undang Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada posisi sub nasional. Seperti yang tertuang dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang artinya desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan didalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Pendamping desa juga bertugas mendorong pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Tujuan pendampingan desa meliputi: 1) meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; 2) meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; 3) meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan 4) mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Program Pendamping Desa di Kabupaten Bengkulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu. Salah satunya karena kondisi pembangunan yang belum terlaksana dengan baik dan belum merata disetiap desa sehingga menimbulkan kesenjangan antar desa. Berikut jumlah dan klasifikasi pendamping desa Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut :

**Tabel.I.1. Data Pendamping Desa Kabupaten Bengkulu**

No	Klasifikasi Desa Pendamping	Jumlah (Orang)
1	Pendamping Desa Ekonomi	170
2	Pendamping Desa Pembangunan	88
3	Tenaga Akuntansi Desa	7
	<b>Jumlah</b>	<b>265</b>

Sumber : DPMD Kabupaten Bengkulu

Semenjak dicanangkan program Pendamping Desa ini pada tahun 2011 yang lalu, terindikasi belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap pemerintah desa sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Desa.

### B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah **"Bagaimanakah dampak dari Program Pendamping Desa di Kabupaten Bengkulu?"**.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari program Pendamping Desa terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkulu.

## STUDI KEPUSTAKAAN

### A. Konsep Kebijakan Publik

Berbagai batasan mengenai kebijakan publik diberikan oleh para ahli, meskipun tidak menyebutkan secara spesifik siapa pelaku kebijakan publik, kebijakan publik sering diberi batasan sebagai hasil-hasil keputusan (*decision*) yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik. Derbyshire (dalam Wibawa, 1994:20) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian, kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

### B. Konsep Evaluasi

Menurut Wirawan (2011:7), Evaluasi itu adalah sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi menghasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Menurut Arikunto (2006:10), evaluasi adalah untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

### C. Konsep Pemerintahan Desa

Desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pengertian tentang pemerintahan desa dinyatakan yakni, Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian dan konsep tentang pemerintahan desa seperti tersebut diatas, maka perlu dipahami beberapa hal terkait tentang desa tersebut, yakni :

1. Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
2. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat;
3. Pemerintahan desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rauf dan Maulidiah, 2015:19).

#### **D. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang tertulis dalam pasal penjelasan 12, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

#### **E. Konsep Pendamping Desa**

Pendamping Desa bukan pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja Pendampingan Desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Dengan demikian, pendamping desa tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa yang berdasarkan Undang-Undang Desa sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah desa.

Pendampingan Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pasal 1 ayat (14) adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa. Selanjutnya dalam pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan pendamping desa meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Menurut pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat

Desa. Selanjutnya dalam pasal 12 dijelaskan bahwa Pendamping Desa memiliki tugas :

1. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
5. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
6. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
7. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis, karena Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan organisasi perangkat daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan program pendamping desa tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian survey, tingkat eksplanasinya deskriptif serta menggunakan analisis data kualitatif. Peneliti mewawancarai secara langsung dan secara mendalam kepada *key informant* yang dianggap paling mengetahui Program Pendamping Desa dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Berikut tabel informan penelitian.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kepala DPMD	1
2	Kabid Pemerintahan Desa	1
3	Kasubid Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan SDM	1
4	Camat	4
5	Kepala Desa	7
6	Pendamping Desa	12
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2018

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Meningkatkan Kapasitas, Efektifitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa

Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa merupakan salah satu tujuan dari keberadaan program pendampingan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di lokasi penelitian bahwa dalam hal meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa secara normatif bahwa tujuan ini sudah tercapai walaupun memang untuk menuju kesempurnaan adalah sesuatu yang masih dalam usaha untuk mencapainya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis Drs. Yuhelmi dalam wawancaranya ia mengatakan “kalau bicara peningkatan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa sampai hari ini kami rasakan terus ada perbaikan. Ini menurut kami salah satu dampak dari program pendampingan ini, sehingga memang program ini kami rasa masih sangat efektif untuk diteruskan”. Drs. Yuhelmi menjelaskan bahwa dalam hal kapasitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa di kabupaten Bengkalis sudah cukup memuaskan. Hal ini kami katakan karena memang sampai saat ini kapasitas pembangunan di desa – desa yang ada di Bengkalis terus mengarah kepada hal yang positif”.

Kemudian, dalam hal efektifitas juga kami ketakan cukup baik karena memang pembangunan yang selama ini dilakukan di desa juga merupakan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, contohnya semenisasi jalan, pembangunan perkantoran desa yang lebih baik dan lain sebagainya, dan hal ini juga memang sampai saat ini masih bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Senada dengan Drs. Yuhelmi, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Asnurial, AP, M.Si mengatakan dalam pandangannya bahwa dengan adanya program pendampingan desa ini, masyarakat desa di kabupaten Bengkalis terus meningkat keberdayaannya. “Kami melihat sejak adanya program ini, masyarakat di Bengkalis ini semakin berdaya kehidupannya. Sebab memang yang selama ini mereka sulit dalam menikmati infrastruktur, sekarang mereka lebih menikmatinya. Saya mencontohkan, dalam hal infrastruktur jalan misalnya, selama ini mereka untuk menjual hasil pertanian mereka cukup sulit karena memang jalan ke desa mereka tidak sebagus seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah cukup baik lah. Jadi mau memasarkan hasil pertanian mereka sudah semakin mudah”.

Begitu juga dengan H. Mulyadi, SH. MH yang

merupakan Camat Bukit Batu mengatakan bahwa selama ia menjabat sebagai camat Bukit Batu sejak hampir 2 tahun yang lalu, ia melihat progres desa sebagai wilayah terkecil dalam pemerintahan yang merupakan wilayah yang di bawah koordinasinya terus memperlihatkan progres yang cukup baik. “Selama saya menjabat di Bukit Batu ini, saya melihat progres pembangunan desa terus meningkat. Kemudian juga pertanggungjawaban desa juga dari taun ke taun semakin baik dan rapi. Ini mungkin dampak dari pendampingan desa yang semakin baik”.

Begitupun dengan Reza Noverinda, AP., M.Si yang merupakan camat di kecamatan Bantan, ia juga mengapresiasi program pendampingan ini yang menurutnya semakin lama semakin baik. “Saya mengapresiasi program ini. Menurut saya program semacam ini harus terus dilanjutkan dan kalau bisa harus ditingkatkan lagi”.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Asnurial, AP, M.Si mengatakan bahwa selama ada program pendampingan desa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bengkalis ini desa – desa yang ada di kabupaten Bengkalis semakin lama semakin baik, khususnya dalam hal pemerintahan. “Saya melihat selama ini pemerintahan desa semakin lama semakin baik, khususnya dalam tata pemerintahannya”. Contohnya kata Drs. Yuhelmi bahwa setiap tahun laporan pertanggungjawaban desa yang diterimanya sudah masuk dalam kategori baik. Artinya hal ini merupakan peningkatan yang terjadi yang tentunya ini merupakan perbaikan dalam hal pemerintahan desa.

Namun, disisi lain para kepala desa yang ada di Bengkalis menganggap bahwa keberadaan pendamping ini sejatinya belum memberikan dampak yang memuaskan. Bagi mereka keberadaan pendamping ini malah menjadikan mereka lebih sulit dalam menjalankan pemerintahannya. Sebab menurut mereka keberadaan pendamping ini menjadikan mereka seolah memiliki tanggungjawab baru dalam bentuk keharusan mereka untuk berkomunikasi dengan para pendamping desa yang ada. Disisi lain, menurut mereka kemampuan para pendamping ini untuk menyelesaikan masalah pemerintahan desa juga tidak begitu mumpuni.

“Saya menganggap keberadaan pendamping yang ada di desa saya tidak memiliki dampak yang baik. Sebab selama ini saya melihat pendamping desa itu juga gak memiliki kemampuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi di desa kami. Mungkin karena gak punya pengalaman itu”. Kata M. Daitul Amin Kepala Desa Bantan Air Kecamatan Bantan. Hal seperti yang dikatakan M. Daitul Amin tersebut juga hampir dikatakan oleh semua kepala desa yang kami wawancarai dalam penelitian ini.

Kemudian, ketika para pendamping desa yang menjadi pelaksana dari program ini diwawancarai, mereka berdalih bahwa memang sulit untuk

berkomunikasi dengan para kepala desa untuk melakukan pendampingan. Menurut mereka bahwa program ini harusnya menekankan kewajiban untuk mengikuti arahan yang mereka berikan. Hal tersebut dikatakan oleh mayoritas pendamping yang kami wawancarai dalam penelitian ini.

### **B. Meningkatkan Prakarsa, Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa yang Partisipatif**

Dalam hal meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, kami melihat bahwa program ini belum memiliki dampak yang baik. Sebab, dalam penelitian kami ini, berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan para informan penelitian yang kami lakukan sebagian besar informan mengatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan terhadap prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian besar kepala desa yang menjadi informan kami, bahwa keberadaan program ini tidak mampu membuat prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat meningkat untuk melakukan pembangunan desa. "Saya tidak melihat ada dampak yang positif dari keberadaan pendamping desa ini terhadap masyarakat kami. Kalau penglihatan saya, selama ini yang melakukan ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan itu perangkat kami, bukan pendamping desa". Kata Sulaini yang merupakan kepala desa Bantan Sari Kecamatan Bantan.

Senada dengan Sulaini, Azman yang merupakan kepala desa Deluk Kecamatan Bantan mengatakan tidak melihat kemampuan pendamping desa yang ada di desa nya untuk meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakatnya selama ini. Menurutnya, masyarakatnya dari dulu memang sudah terbiasa melakukan gotong royong dalam pembangunan yang ada di desa, khususnya pembangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan bersama.

"Saya tidak melihat pendamping desa yang ada di desa kami ini memberikan dampak terhadap masyarakat desa dalam hal prakarsa, kesadaran dan partisipasinya dalam pembangunan. Masalahnya, kalau untuk partisipasi pembangunan, selama ini masyarakat desa kami memang sudah biasa bergotong – royong. Apalagi untuk pembangunan yang sifatnya untuk kebersamaan di desa ini. Saya contohkan dalam hal pembangunan gorong-gorong atau parit. Masyarakat kami bisa bergotong-royong itu. Jadi gak ada pengaruh dari pendamping desa di situ".

Kemudian, para pejabat Bengkalis yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Camat yang menjadi bagian dari informan penelitian ini kami wawancarai, mereka seolah mengamini apa yang

menjadi pendapat dari para kepala desa yang ada. Hal ini mereka katakan karena perkembangan masyarakat desa memang kepala desa lah yang paling tahu.

"Kami tidak mengetahui secara pasti kalau masalah perkembangan masyarakat desa dalam hal prakarsa, kesadaran dan partisipasinya dalam pembangunan desa. Karena kalau masalah itu, tentulah kepala desa yang paling tahu. Kan kepala desa yang sehari-hari bersama masyarakatnya. Yang kami ketahui secara pasti itu bahwa memang dalam hal pemerintahan desa kami melihat ada peningkatan atau perbaikan". Kata Drs. Yuhelmi yang merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis.

Hal senada juga disampaikan oleh Djamaludin, AP, M.Si yang merupakan camat Kecamatan Bengkalis. Ia mengatakan bahwa kalau yang lebih mengetahui peningkatan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa tentu kepala desa yang lebih faham. "Kalau untuk masalah itu, tentulah kepala desa yang lebih faham. Kan memang mereka yang lebih dekat dengan masyarakat. Kalau kita ini kan hanya tahu sebatas kepala desa nya saja. Kalau masyarakat kita kurang faham". Katanya.

Namun ketika permasalahan ini dikonfirmasi kepada para tenaga pendamping desa, mereka mengeluhkan posisi mereka yang menurut mereka kurang jelas dalam pendampingan ini. Menurut mereka bahwa selama ini yang seharusnya mereka sebagai ahli dalam pemerintahan desa dalam berbagai sektor, namun kenyataannya dalam keseharian mereka seolah mereka itu seperti menjadi staff atau seperi bagian dari perangkat dalam pemerintahan desa.

"Saya bingung dengan posisi saya di desa ini. Kalau seharusnya kan saya ini sebagai ahli di desa ini. Tapi kenyataannya saya ini seolah seperti pegawai desa yang membuat program desa. Kami kan bukan perangkat desa. Jadi untuk permasalahan yang seperti ini kami lebih sering diskusi dengan perangkat desa, tapi kadang-kadang juga kami turun ke masyarakat untuk berdiskusi". Kata Jefri, S.IKom yang merupakan pendamping di desa Bantan Air. Begitupun dengan para pendamping lain, mereka rata-rata memiliki keluhan yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Jefri, S.IKom itu sebagai pendamping desa.

### **C. Meningkatkan Sinergi Program Pembangunan Desa Antarsektor**

Dalam hal meningkatkan sinergitas pembangunan desa antarsektor, keberadaan pendamping desa di nilai belum memiliki dampak yang belum memuaskan. Sebab hal ini seperti yang dikatakan beberapa kepala desa yang kami wawancarai sebagai informan dalam penelitian ini.

Sebagai contoh, apa yang disampaikan oleh Meftahudin yang merupakan Kepala Desa Sebauk



Kecamatan Bengkalis. Menurutnya keberadaan pendamping desa itu seharusnya memiliki dampak yang baik dalam hal meningkatkan sinergitas pembangunan desa antar sektor. Namun menurutnya ada permasalahan ketidakmampuan mereka untuk memahami permasalahan yang datang.

“Seharusnya kan keberadaan pendamping ini bisa mencari solusi permasalahan yang kita hadapi. Namun kenyataannya hari ini keberadaan mereka itu belum cukup mampu memberikan solusi yang baik. Mungkin ini karena faktor pengalaman sih. Terkadang kan mereka itu secara akademik juga gak sesuai. Ada yang pendamping ekonomi tapi jurusannya bukan ekonomi, ada yang pendamping pembangunan tapi malah sarjana agama. Gak sesuai jurusan”. Kata Meftahudin.

Hal senada juga disampaikan oleh Yulisman yang merupakan kepala desa Kelapa Pati. Menurutnya keberadaan pendamping desa itu tidak sesuai dengan program yang didampinginya dengan keahliannya dalam akademik. Yulisman juga menyayangkan hal itu, sebab menurutnya keberadaan pendamping ini semestinya memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan desa. “Ini kan banyak sekali pendamping yang gak sesuai dengan jurusannya. Dia sarjana teknik jadi pendamping ekonomi, dia sarjana ekonomi malah jadi pendamping pembangunan. Kebalik-kebalik. Ini yang saya sayangkan. Secara pribadi menurut saya keberadaan pendamping itu kan harusnya memberikan dampak yang baik untuk desa. Bisalah bantu kami, jangan malah buat pusing”. Kata Yulisman.

Selanjutnya, para kepala desa yang ada (yang merupakan informan penelitian ini) juga memberikan komentar yang senada dengan Meftahudin dan Yulisman sebagai sesama kepala desa. Mayoritas dari mereka mengatakan bahwa kesesuaian keahlian pendamping dengan programnya menjadi salah satu masalah yang mendasar dalam program pendampingan desa ini.

Kemudian, ketika hal ini ditanyakan kepada Drs. Yuhelmi yang merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bengkalis, ia kemudian mengatakan bahwa program ini melalui seleksi yang cukup ketat. Menurutnya, selain seleksi akademik, para pendamping desa ini juga telah dilakukan pelatihan sebelum diterjunkan secara langsung ke desa.

“Kalau masalah linearitas akademik sebenarnya itu sudah kita lakukan melalui seleksi yang ketat. Namun kami juga tidak memungkiri mungkin masih ada yang tidak sesuai. Namanya saja manusia, pasti ada salahnya. Sempurna itu kan gak mungkin. Namun kami juga selain melakukan seleksi ini, kami juga sudah melakukan bimbingan atau pelatihan sebelum kami menerjunkan mereka secara langsung ke masyarakat”.

Kemudian, Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Drs. Yuhelmi juga mengatakakan bahwa mereka telah melakukan pelatihan yang baik sebelum menerjunkan para pendamping ke lokasi atau desa yang mereka dampingi. “Kami sebelum menerjunkan pendamping ini ke desa nya masing-masing, kami sudah melatih mereka. Sehingga harapan kami memang mereka itu sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan pendampingan kepada desa dalam hal – hal tertentu”. Kata Drs. Yuhelmi.

Selanjutnya, semua pendamping yang merupakan informan dalam penelitian ini mengatakakan, bahwa mereka tidak mempermasalahkan apa yang dipermasalahkan oleh kepala desa mereka. Yang mereka tahu itu mereka bekerja untuk memenuhi hajat hidupnya.

“Saya ini kan cari kerja. Syarat saya penuhi, kemudian saya lolos seleksi ya saya bekerja. Kalau masalah jurusan itu menurut saya tidak relevan. Kami sebenarnya mampu kok jadi pendamping ini. Masalahnya bukan kami gak mampu. Kemampuan itu kan gak diukur dari jurusannya. Tapi kemampuannya di lapangan”. Kata Aswin Cahyo Wibowo, ST yang merupakan pendamping pembangunan di desa Penampi Kecamatan Bengkalis.

Hal senada juga dikatakan oleh Mahmud Hasibuan S.Pdi yang merupakan pendamping ekonomi di desa Dompas Kecamatan Bukit Batu. “Kalau mau tahu kemampuan seseorang itu gak bisa kita lihat dari gelarnya, tapi lihat dia bekerja. Kalau kita lihat dari gelarnya, banyak kok yang SE (Sarjana Ekonomi) tapi miskin. Kalau mereka memang ahli, kenapa coba gak kaya-kaya”. Tanya Mahmud Hasibuan S.Pdi sebagai pendamping desa ekonomi desa Dompas Kecamatan Bukit Batu.

#### **D. Mengoptimalkan Aset Lokal Desa Secara Emansipatoris**

Program pendampingan desa dalam hal meningkatkan aset lokal desa secara emansipatoris menurut kami juga belum memiliki dampak yang cukup signifikan. Hal ini berdasarkan dari wawancara yang kami lakukan dengan para informan dalam penelitian ini.

Seperti yang dikatakan oleh Mahrozi yang merupakan kepala desa Pangkalan Jambi. Menurutnya keberadaan pendamping desa ini tidak mampu memberikan dampak yang positif dalam setiap hal, khususnya dalam hal pengoptimalan aset lokal desa secara emansipatoris. Mahrozi juga menambahkan bahwa hal ini menurutnya sebagai dampak dari ketidakseriusan Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan program ini.

“Saya sendiri melihat tidak ada peningkatan yang signifikan dari keberadaan pendamping desa ini. Khususnya dalam hal mengoptimalkan aset

lokal desa secara emansipatoris, gak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau di desa saya gak ngaruh sama sekali. Ntahlah kalau di desa lain”. Kata Mahrozi

Hal senada juga dikatakan oleh Jafar yang merupakan kepala desa Bukit Batu bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan dengan adanya pendamping desa di desa nya. “Di desa kami saya lihat tidak ada peningkatan yang signifikan dengan adanya pendamping desa ini. Selama ini yang terus mengoptimalkan aset desa ya kami sendiri. Pendamping itu tidak kayaknya gak faham apa-apa lah”. Katanya.

Hal yang demikian itu juga disampaikan oleh Dedi Sumantri yang merupakan Kepala Desa Makeruh. Menurutnya pendamping yang ada di desa nya tidak memiliki kemampuan untuk membantu mengoptimalkan aset yang ada di desa nya. “Saya melihat pendamping yang ada di desa kami ini tidak memiliki kemampuan untuk bisa membantu kami mengoptimalkan aset desa kami. Selama ini kami saja yang terus berusaha megoptimalkan aset desa kami, BPD dan perangkat desa kami yang terus berupaya itu”.

Kemudian, ketika ditanya mengenai hal ini kepada Drs. Yuhelmi yang merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Bengkalis, ia mengatakan bahwa untuk hal itu memang menjadi harapannya untuk terjadi optimalisasi. Namun menurutnya, setelah mereka melakukan pelatihan mereka tentu berharap untuk perbaikan dalam hal itu.

“Kami ini tidak mengetahui secara pasti bagaimana dampak yang sesungguhnya. Namun yang kami lihat selama ini sudah banyak aset lokal desa yang teroptimalkan di desa yang ada di kabupaten Bengkalis. Saya mencontohkan di berbagai desa yang selama ini belum memiliki aset di sektor pariwisata kini sudah memiliki sektor itu, banyak lagi sebenarnya tapi kalau mau data jelasnya nanti bisa diambil di kantor dinas masing – masing sektor”.

Hal senada juga di katakan oleh para camat yang menjadi informan penelitian ini. Seperti halnya Hanafi S.Pi, M.Si yang merupakan camat di Kecamatan Rupert. Ia mengatakan bahwa untuk peningkatkan optimalisasi aset desa di wilayah kerjanya beberapa tahun terakhir sudah memiliki peningkatan yang cukup signifikan. “Kalau di kecamatan kita ini saya lihat ada peningkatan yang cukup signifikan dalam hal optimalisasi aset desa lah. Beberapa tahun ke belakang memang ada peningkatan. Tapi untuk jelasnya dalam bidang – bidang apa saja lebih jelas bisa di cari di dinas – dinas atau ke desa nya langsung”.

Kemudian, hal yang hampir sama disampaikan oleh beberapa pendamping desa yang kami teliti dalam penelitian ini. Salah satunya Ibnu Saud, ST yang merupakan pendamping bidang pembangunan di desa Pergam Kecamatan Rupert. Ia mengakui

bahwa sampai saat ini memang sulit untuk meningkatkan aset lokal di desa Pergam Kecamatan Rupert yang di dampinginya. “Memang saya pribadi mengakui bahwa memang sulit untuk meningkatkan aset lokal di desa ini. Kita gak ngerti aset apa yang mau ditingkatkan. Desa ini kan lihat sendiri lah, ntah apa yang mau dioptimalkan”, Ibnu Saud, ST.

Dari gambaran wawancara diatas dapat dilihat bahwa mengoptimalkan aset lokal secara emansipatoris belum terlaksana dengan optimalkan disebabkan karena ketidak pemahaman dari pendamping desa mengenai bagaimana melakukan pendampingan desa yang dapat mengoptimalkan aset lokal secara emansipatoris. Selain itu, belum optimalnya aset lokal ini juga disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran desa di Kabupaten Bengkalis terhadap pemahamannya tentang optimalisasi aset yang dimiliki desanya sendiri.

#### **E. Dampak Prgoram Pendamping Desa di Kabupaten Bengkalis**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai pelaksanaan program pendamping desa di Kabupaten Bengkalis, yang dilihat dari indikator-indikator penelitian diatas. Ada beberpa hala yang menjadi catatan penting dalam penelitian ini, terkait dengan Evaluasi Program Pendamping Desa di Kabupaten Bengkalis. Terutama dalam hal dampak dari adanya program pendamping desa di Kabupaten Bengkalis.

*Pertama*, dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa, pendamping desa terutama pendamping desa ekonomi menjadi salah satu pendorong aparatur desa dalam memahami dan menjalankan akuntabilitas dalam pemerintahan desa di Kabupaten Bengkalis. Hal ini oleh karena keberadaan pendamping desa yang memberikan bantuan berupa petunjuk teknis terhadap pelaksanaan administrasi di desa sehingga mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa.

*Kedua*, dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, masih belum bisa menunjukkan signifikansi yang optimal dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ni tidak terlepas dari tidak ada kejelasan bagaimana peran sesungguhnya pendamping desa dalam meningkatkan prakarsa kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang partisipatif. Dimana selama ini, yang dilakukan pendamping desa dalam hal ini hanya pada kehadiran pada saat musyawarah perencanaan pembanguna desa dan kemudian memberikan saran bila diminta oleh kepala desa.

*Ketiga*, keberadaan pendamping desa dalam meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor, juga terlihat masih belum berdampak

signifikan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan peran perangkat desa yang memberikan kontribusi belum signifikan dalam program pembangunan yang berkelanjutan. Sinergitas pembangunan didesa seharusnya dilakukan pendamping desa dengan mewujudkan pendampingan desa yang mampu melakukan kerjasama dengan perangkat desa terhadap program pembangunan yang akan dilakukan dan dibangun di desa Kabupaten Bengkulu.

*Keempat*, keberadaan pendamping desa dalam mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris, juga terlihat masih belum berdampak optimal. Hal ini terlihat dari bagaimana masih banyaknya desa yang belum bisa memetakan aset lokal desanya. Keberadaan pendamping desa seharusnya dapat membantu desa dalam memetakan aset desa yang dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan desa. Keberadaannya juga harus ditunjang dengan kebebasan dari pemetaan aset yang akan dilakukan oleh Desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Pelaksanaan program pendamping desa di Kabupaten Bengkulu pada dasarnya belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dimana keberadaan pendamping desa di Kabupaten Bengkulu masih memberikan dampak yang belum signifikan terhadap peningkatan kemampuan aparatur desa di Kabupaten Bengkulu baik dalam aspek kapasitas dan efektifitas meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, dan meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor serta mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan berbagai informen maka ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan program pendamping desa di Kabupaten Bengkulu yakni :

1. Pendamping Desa di Kabupaten Bengkulu masih ditemukan ada yang belum memahami fungsinya sebagai pendamping desa, terutama pendamping desa ekonomi yang masih belum bisa memetakan aset lokal yang ada di Desa Kabupaten Bengkulu.
2. Kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan pendamping desa yang ada di Kabupaten Bengkulu juga menjadi kendala utama dalam keberhasilan dari program pendamping desa ini. Dimana masih banyak kepala desa yang merasa keberadaan pendamping desa tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Bengkulu.

### B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan dalam Evaluasi Program Pendamping Desa di Kabupaten Bengkulu yakni :

1. Pendamping desa pada dasarnya harus lebih memahami setiap tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa di Kabupaten Bengkulu, sehingga tujuan dari keberadaan program pendamping desa dapat tercapai dan terlaksana dengan optimal.
2. Pemerintah Desa dapat lebih mengoptimalkan keberadaan pendamping desa untuk memajukan dan meningkatkan kapasitas dari aparatur desa serta memanfaatkan keberadaan pendamping desa untuk memetakan aset lokal yang dimiliki desa demi kepentingan desa.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku :

- Azizy, A. Qodri. 2007. *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dunn N, William. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjahmada University Press. Yogyakarta.
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 2003. *Kybernologi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 2008. *Kybernologi Sebuah Metamorphosis*. Sirao Credentia Center. Tangerang.
- Nugroho, Ryant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Rauf, Rahyunir & Maulidiah, Sri. 2015. *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing. Yogyakarta.
- Rasyid, Riyas. 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. PT. Mutiara Sumber Widia. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance*. Mandar Maju. Jakarta.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press. Malang.
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sulaeman Affan. 1998. *Diktat Kebijakan Pemerintah*. BKU Ilmu Pemerintahan



- Kerjasama Unpad – IIP. Bandung.
- Supriyatno, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Media Brilian. Tangerang. Sumoprawiro, Hariyoso. 2002. *Pembaruan Birokrasi Dan Kebijakan Publik*. Peradaban. Jakarta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Suyanto, Bagong & Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media. Jakarta.
- Syafi'ie, Kencana, Inu. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wasistiono, Sadu & Irwan, M, Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia. Bandung.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Intermedia. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

#### **Skripsi**

Ahmad Fajar Adi Pratama. 2017. "*Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi Di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*". Laporan penelitian S1 Ilmu Administrasi Negara. Universitas Lampung.

#### **Jurnal**

Rezky Susanti. 2015. "*Efektivitas Pendampingan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis*". Dalam Jom FISIP Volume 2 No 1- Februari 2015.